

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2020-2024



**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
TAHUN ANGGARAN 2024**

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Kepala LRSDKP

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Urusan Umum LRSDKP

PENYUSUN

Anom Bayu Santoso

Mugianto

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I INFORMASI UMUM	1
1.1. Ringkasan Alur Proses Reviu atas Revisi Renstra LRSDKP.....	1
1.2. Dasar Hukum Reviu.....	3
1.3. Tujuan Reviu.....	3
1.4. Ruang Lingkup Reviu	4
BAB II URAIAN HASIL REVIU	5
2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama LRSDKP Tahun 2020-2021.....	5
2.2. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022	7
2.3. Perubahan Rencana Kerja LRSDKP Tahun 2023.....	11
BAB III PENUTUP	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Indikator Kinerja LRSDKP Tahun 2022-2024	3
Tabel 2. Target Indikator Kinerja BRSDM Saat Transformasi ke BPPSDM Tahun 2023-2024	8
Tabel 3. Penyesuaian Indikator Kinerja LRSDKP Tahun 2023	10
Tabel 4. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja LRSDKP Per Januari 2023	11

BAB I

INFORMASI UMUM

1.1. Ringkasan Alur Proses Reviu atas Revisi Renstra LRSDKP

Perencanaan pembangunan yang baik adalah proses yang didasarkan pada proses evaluasi yang berkesinambungan. Proses evaluasi merupakan bagian dari siklus perencanaan itu sendiri. Dalam periode tertentu hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan untuk memperbaiki perencanaan pada waktu yang telah berjalan dan menjadi landasan untuk waktu yang akan datang. Rencana Strategis Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Renstra LRSDKP) 2020-2024 tidak lepas dari proses evaluasi. Sebagai Satuan Kerja (Satker) terkecil dari susunan organisasi besar Badan Riset Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kelautan Perikanan, maka perubahan yang terjadi pada Renstra LRSDKP mengikuti Satker atau Unit Kerja atasannya yaitu Pusat Riset Kelautan. Perubahan yang terjadi merupakan tanggapan terhadap kondisi lingkungan strategis aktual yang terjadi di lingkup nasional, kementerian atau sub sektor perikanan dan kelautan. Proses evaluasi perencanaan itu sendiri mulai dilakukan di tahun 2021.

Tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020. Menindaklanjuti Renstra KKP tersebut BRSDM telah menetapkan Rencana Strategis BRSDM Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Kepala BRSDM Nomor 180/PER-BRSDM/2021 tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2024. Kemudian dalam rangka mengantisipasi perubahan kelembagaan BRSDM KP diperlukan penyesuaian kebijakan terkait susunan organisasi. Hal ini sebagai tindak lanjut implementasi amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Konsekuensi dari perpres tersebut maka BRSDM harus melepas fungsi risetnya untuk melebur pada BRIN. Peleburan secara menyeluruh ini meliputi lembaga, tugas dan fungsi serta sejumlah aset riset.

Perubahan kelembagaan yang terjadi merupakan reformulasi arah kebijakan dan sasaran strategis yang berfokus untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Kekuatan SDM dimaksudkan salah untuk mendukung tujuan pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang pada periode pembangunan tahap-4 (2020-2024). Tujuan tersebut yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terwujudnya pembangunan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Salah satu faktor yang dipercaya bisa mempercepat pencapaian itu adalah dukungan masif SDM berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan pada Renstra 2020-2024 perlu disesuaikan dengan adanya perubahan arah kebijakan BRSDM 2021. Perubahan tersebut lebih merupakan dukungan terhadap perencanaan pembangunan KP nasional yang salah satunya melalui penyediaan SDM Kompeten (Visi-1) dan mewujudkan pelaku utama mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keterlanjutan sumber daya KP (Visi-8) yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan SDM yang kompeten. Rencana selanjutnya adalah dukungan tersebut mampu dengan optimal memberikan dampak pada peningkatan ekonomi melalui 3 (tiga) Prioritas KKP tahun 2021-2024. Hal ini sebagai langkah terobosan dalam pelaksanaan program yang telah dicanangkan yaitu (1) Penerapan kegiatan penangkapan ikan terukur di setiap WPP untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan kesejahteraan nelayan dan juga meningkatkan PNBP sebagai kontribusi peningkatan ekonomi kepada negara; (2) Pengembangan budidaya berbasis ekspor di mana terdapat 4(empat) komoditas perikanan budidaya yang merupakan komoditas unggulan di pasara global yaitu udang, lobster, kepiting dan rumput laut; serta (3) Pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Selanjutnya, pada tanggal 6 Desember 2021 melalui Nota Dinas Nomor 7142/BRSDM.1.RC.210/XII/2021 BRSDM menyampaikan justifikasi usulan pemuktahiran Prioritas Nasional dan *Major Project* pada Rencana Kerja BRSDM Tahun 2021, yang kemudian menjadi dasar tindak lanjut atas Rekomendasi Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) BRSDM. Rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa BRSDM perlu melakukan revisi Renstra BRSDM Tahun 2020-2024. Revisi dilakukan untuk merubah target jangka menengah yang disesuaikan dengan standar biaya per sasaran atau per IKU (biaya *output/outcome*) dan Indikator Kinerja Terbaru.

Perubahan yang terjadi pada Renstra BRSDM pada gilirannya juga mendorong perubahan pada Renstra LRSDKP. Perubahan yang terjadi merupakan penyesuaian terhadap dinamika organisasi pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebagai satuan kerja yang dibentuk dengan tugas dan fungsi riset maka LRSDKP harus melepas tuisi riset tersebut dan melebur pada BRIN. Pada mulanya direncanakan LRSDKP melebur sepenuhnya pada BRIN meliputi lembaga, SDM dan aset. Kemudian pada perkembangan terakhir hanya SDM dan sebagian aset yang akan berpindah ke BRIN. SDM yang berpindah juga tidak semuanya, melainkan hanya fungsional peneliti dan fungsional litkayasa. Itupun setiap personel masih diberi kesempatan untuk memilih tetap di KKP dengan konsekuensi alih fungsional. Perubahan organisasi sendiri rencananya akan diselesaikan paling lambat pada bulan Agustus 2022. Perubahan yang dimaksud adalah perpindahan personel dan aset tertentu, sedangkan untuk proses penataan organisasi internal akan dilakukan bertahap setelahnya. Hingga saat ini proses penataan organisasi belum juga paripurna, LRSDKP masih bertahan

dengan nomenklatur yang sama dan belum mempunyai tugas dan fungsi yang baru. Dengan dinamika organisasi seperti tersebut di atas, maka penyesuaian Renstra LRSDKP harus disiapkan dan dilakukan.

1.2. Dasar Hukum Reviu

Perubahan Rencana Strategis LRSDKP tahun 2020-2024 sejalan dengan perubahan pada Rencana Strategis BRSDM tahun 2020-2024, yang didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas No 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Renja Kementerian/Lembaga
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Prganisasi dan tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Perauturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- h. Surat Sekretaris Jenderal Nomor 1616/SJ.4/HK.160/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;
- i. Surat Sekretaris BRSDMKP Nomor B.5995/BRSDM/RC.210/XII/2022 perihal Pemuktahiran Renja TA 2022 Pasca Realokasi Anggaran ke BA BUN tanggal 1 Desember 2022

1.3. Tujuan Reviu

Tujuan reviu atas Revisi Renstra LRSDKP adalah:

- a. Menelaah ulang relevansi dokumen Revisi Rencana Strategis LRSDKP tahun 2020-2024 terhadap target output dalam sistem perencanaan pembangunan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Hal ini dilakukan supaya dokumen Renstra LRSDKP sejalan dengan Renstra BRSDM dan sesuai dengan perubahan-perubahan aktual dalam lingkungan strategis di lingkup nasional, KKP dan BRSDM sendiri;

- b. Melakukan penyesuaian dokumen Revisi Rencana Strategis LRSDKP tahun 2020-2024 disandingkan dengan perubahan Rencana Strategis Pusat Riset Kelautan sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris BRSDM KP Nomor B. 5995/BRSDM/RC.210/XII/2022 perihal Pemuktahiran Renja TA 2022 Pasca Realokasi Anggaran ke BA BUN tanggal 1 Desember 2022

1.4. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup Reviu atas Revisi Renstra LRSDKP sejalan dengan Revisi Renstra BRSDM tahun 2020-2024 adalah pada Bab IV, terkait Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada level Eselon I yang meliputi:

- a. Indikator dan Target 2021-2024 serta Capaian Kinerja LRSDKP Tahun 2022 hingga 2023;
- b. Perubahan Indikator Kinerja LRSDKP Tahun 2023 dan 2024;
- c. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala LRSDKP Tahun 2023 dan 2024.

BAB II

URAIAN HASIL REVIU

2.1. Reviu Sasaran Program dan Indikator Kinerja LRSDKP Tahun 2021-2024

Berikut ini adalah matrik Target Indikator Kinerja LRSDKP tahun 2022 sampai dengan 2024,

Tabel 1. Target Indikator Kinerja LRSDKP Tahun 2022-2024

Sasaran Program 2021	Sasaran Program 2022-2024	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Reviu Renstra	Realisasi LKj	Target Reviu Renstra	Target Renstra
				2021	2021	2022	2022	2023	2024
Hasil riset dan inovasi kelautan dan perikanan dimanfaatkan			Data, informasi dan peta hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan	3	3				
			Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan teknologi adaptif lokasi (desa/kawasan)	1	1				
			Data dan/atau informasi pemetaan sumber daya dan Kerentanan pesisir (paket)	5	5				
			Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Kelautan (Paket)	1	1				
			Sarana Riset Kelautan pada satker LRSDKP (Unit)	1	1				
			Jejaring dan/atau kerja sama Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	2	2				
			Karya Tulis Ilmiah hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dipublikasikan (Dokumen)	15	15				

Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LRSDKP	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup LRSDKP		Persentase layanan dukungan Manajemen internal satker LRSDKP (persen)	100	100	100	100	100	100
			Indeks profesionalits ASN Bidang Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks)	100	100	74	84,50	78	82
			Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	84	84	86	86	92	94
			Nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada LRSDKP (Nilai)	89	89	89	89	93,75	93,76
			Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan realisasi anggaran LRSDKP (Persen)	1	1	1	1		≤ 0,5
			Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	65	65	70	70		
			Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	87	87	92	92	93	94
			Nilai kinerja anggaran LRSDKP (nilai)	86	86	81	81	82	82
			Unit Kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)			1	1		

2.2. Reviu Sasaran Program dan Indikator Kinerja LRSDKP Saat Tranformasi BRSDM ke BPPSDM Tahun 2021-2024

Pasca pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berimbas pada dihapuskannya fungsi riset di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, maka konsekuensinya adalah perubahan Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target pada masa transisi perubahan organisasi dari BRSDM ke BPPSDM. Berikut ini adalah matriks Target Indikator Kinerja LRSDKP

Tabel 2. Target Indikator Kinerja LRSDKP Saat Transformasi BRSDM ke BPPSDM Tahun 2023-2024

LRSDKP di bawah BRSDM			LRSDKP di bawah BPPSDM				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Juni) 2023	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (unit)	1					
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Juta)	5,2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Juta)	25,7	25,7	48,7
	Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (naskah kerjasama)	2		Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (naskah kerjasama)	2	2	2
	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100		Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100

	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5		Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	78		Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	78	78	82
	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79	79	80
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92		Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	93	93	94
	Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92		Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92	92	94
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75		Persentase rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	82
	Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	89		Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	93,75	93,75	93,76
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (nilai)	82		Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (nilai)	82	82	82

Berdasarkan Tabel 2. penyesuaian pada tahun 2023 dilakukan pada antara lain:

- a. Analisis Perubahan Indikator Kinerja Program
Penghapusan Sasaran Program, Indikator beserta Targetnya pada Sasaran Program “Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan”, dengan Indikator Kinerja “Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (unit)”. Penghapusan ini berkaitan dengan revisi blokir anggaran dan pergeseran anggaran antar program sebagaimana Surat Persetujuan Revisi Anggaran (SPRA) Nomor S733/AG.3/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

- b. Analisis Perubahan Target Indikator Kinerja
 - Perubahan Target IK “Nilai PNBK LRSDKP (Juta Rupiah)” yang semula senilai Rp 5.200.000 menjadi Rp. 25.700.000
 - Perubahan Target IK “Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)” yang semula 92 menjadi 93, terkait dengan dukungan kegiatan utama Reformasi Birokrasi General KKP sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2020-2024.
 - Perubahan Target IK “Nilai IKPA LRSDKP (nilai)” yang semula 89 menjadi 93,75 terkait dengan dukungan kegiatan utama Reformasi Birokrasi General KKP sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2020-2024.

Penyesuaian Indikator Kinerja LRSDKP terkait transformasi organisasi Eselon I menjadi BPPSDM, dipaparkan dalam Tabel 3. berikut,

Tabel 3. Penyesuaian Indikator Kinerja LRSDKP (BRSDM ke BPPSDM) Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023				
		BRSDM		BPPSDM		
		RENSTRA	PK AWAL	PK REVISI		
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta)	5,2	5,2	25,7
		2	Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (naskah kerjasama)	2	2	2
		3	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100
		4	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	78	78	78
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79	79	79
		7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92	92	93
		8	Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92	92	92

		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	75
		10	Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	89	89	93,75
		11	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (nilai)	82	82	82

2.3. Penyesuaian Indikator Kinerja dan Target 2024

Tabel 4. Penyesuaian Indikator Kinerja LRSDKP (BPPSDM) Tahun 2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Target 2024			Keterangan
				RENSTRA	RENJA	PK	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta)	48,7	48,7	48,7	
		2	Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (naskah kerjasama)	2	2	2	
		3	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100	
		4	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan	≤ 1	≤ 0,5	≤ 0,5	Prognosa capaian 2023

		Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)				
5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	82	82	82		
6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	80	80	80		
7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	94	94	94		
8	Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	90	94	94	Prognosa capaian 2023	
9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	80	82		
10	Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	90	93,76	93,76	Prognosa capaian 2023	
11	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (nilai)	82	82	82		

Dari Tabel 4., dipaparkan perubahan Target dari Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang berubah, antara lain,

- IK “Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)” target dari ≤ 1 dinaikkan menjadi $\leq 0,5$ di Renja dan PK;

- IK “Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)” target dari 90 dinaikkan menjadi 94 di Renja dan PK;
- IK “Nilai IKPA LRSDKP (nilai)” target dari 90 menjadi 93,76 di Renja dan PK.

Dasar perubahan yang dilakukan pada target adalah prognosa capaian pada tahun 2023 yang bisa melampaui target pada Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja.

BAB III PENUTUP

Seluruh perubahan pada revidi atas Revisi Rencana Strategis LRSDKP tahun 2022-2023 ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Strategis BRSDM Tahun 2020-2024. Selanjutnya dokumen hasil revidi ini agar dapat dijadikan pedoman oleh seluruh komponen internal LRSDKP dalam melaksanakan program/kegiatan dan kegiatan pada periode Renstra 2020-2024 selanjutnya.

Padang, 29 Februari 2024
Kepala LRSDKP,



Rizki Anggoro Adi